

**TATA KELOLA LINGKUNGAN KAWASAN DALAM
MENANGGULANGI KABUT ASAP LINTAS BATAS DI ASIA
TENGGARA
(STUDI KASUS: INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA)**



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara dalam menanggulangi kabut asap lintas batas. Kabut asap lintas batas masih menjadi permasalahan lingkungan yang sampai saat ini mendapatkan perhatian serius di kawasan Asia Tenggara, meskipun terdapat praktik tata kelola dengan keberadaan rezim ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan kawasan ini memiliki sejarah panjang kerja sama dalam menanggulangi kabut asap lintas batas. Dalam memahami tata kelola lingkungan kawasan akan menggunakan pendekatan konsep *Regional Environmental Governance* dengan tiga pendekatan yaitu *Coordinating Agency*, *Thematical Issue* dan *Territoriality*. Ketiga aspek berkesinambungan antara keadaan tipikal-ideal dalam tata kelola yang direfleksikan dengan menggunakan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat keadaan yang tidak ideal dari transparansi, akuntabilitas dan aturan hukum. Transparansi informasi data yang terbatas terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan Malaysia. Pada aspek akuntabilitas yang dilihat secara horizontal yaitu ketidakaktifan koordinasi badan-badan pemerintah di Indonesia dan Malaysia, terdapat tindakan korupsi dalam pembukaan lahan sawit di Indonesia. Secara vertikal masih terdapat konflik agraria di Indonesia dan Malaysia. Pada aturan hukum terdapat perbedaan pandangan mengenai Transboundary Haze Pollution Act 2014 dari Singapura dengan Indonesia untuk menanggulangi kabut asap, terdapat ketidakadilan penegakan hukum terhadap perusahaan di Indonesia serta konflik agraria mencerminkan perlunya perlindungan hukum untuk masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Hasil analisis penelitian ini menjelaskan terdapat keadaan yang tidak ideal yang menghambat tata kelola dari segi transparansi, akuntabilitas dan aturan hukum yang mempengaruhi koordinasi dan tindakan aktor dalam hal substansi antar wilayah dalam menanggulangi kabut asap lintas batas.

Kata Kunci: Tata Kelola Lingkungan Kawasan, Kabut Asap Lintas Batas, Asia Tenggara, Transparansi, Akuntabilitas, Aturan Hukum



ABSTRACT

This research aims to analyze regional environmental governance in Southeast Asia in dealing with transboundary haze. Transboundary haze is still an environmental problem that is currently receiving serious attention in the Southeast Asia region, even though there are governance practices with the existence of the ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) regime and this region has a long history of cooperation in tackling transboundary haze. In understanding regional environmental governance, we will use the Regional Environmental Governance concept approach with three approaches, namely Coordinating Agency, Thematic Issue and Territoriality. These three aspects are continuous between ideal-typical conditions in governance which are reflected using the Principles of Good Governance. Qualitative research methods which are descriptive analysis are used in this research. This research found that there are conditions that are not ideal in terms of transparency, accountability and the rule of law. Limited transparency of data regarding forest and land fires in Indonesia and Malaysia. In the aspect of accountability seen horizontally, namely the inactivity of coordination between government agencies in Indonesia and Malaysia, there are acts of corruption in the clearing of oil palm land in Indonesia. Vertically, there are still agrarian conflicts in Indonesia and Malaysia. In terms of legal regulations, there are differences in views regarding the Transboundary Haze Pollution Act 2014 from Singapore and Indonesia to tackle haze, there is injustice in law enforcement against companies in Indonesia and agrarian conflicts reflect the need for legal protection for the people in Indonesia and Malaysia. The results of this research analysis explain that there are non-ideal conditions that hinder governance in terms of transparency, accountability and the rule of law which affect the coordination and actions of actors in terms of substance between regions in tackling cross-border haze.

Keywords: *Regional Environmental Governance, Transboundary Haze, Southeast Asia, Transparency, Accountability, Rule of Law*

